

**FENOMENA PEMEKARAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA:
MENGUKUR KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
INDUK DAN DAERAH PEMEKARANNYA**

**LAPORAN AKHIR
SINGGIH SETYA ZENANDA
126231110**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

**FENOMENA PEMEKARAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA:
MENGUKUR KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
INDUK DAN DAERAH PEMEKARANNYA**

**Laporan Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan**

SINGGIH SETYA ZENANDA

126231110



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**FENOMENA PEMEKARAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA:
MENGUKUR KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
INDUK DAN DAERAH PEMEKARANNYA**

Disusun oleh:



Singgih Setya Zenanda

126231110

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Ignatius Roni Setyawan S.E., M.Si.

**FENOMENA PEMEKARAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA:
MENGUKUR KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
INDUK DAN DAERAH PEMEKARANNYA**

Singgih Setya Zenanda

126231110

ABSTRACT

Regional expansion occurred quite massively after the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Local Government, including in Southeast Sulawesi Province. Southeast Sulawesi Province was established in 1964 with four regencies, and by 2014, there had been the expansion of 13 regencies/cities. This study assesses the financial conditions of the parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi Province from 2019 to 2023, using assessment indicators that include regional dependency, fiscal independence, as well as income share and income growth, presented in a quadrant of local capacity distribution. The study shows that the parent and newly formed regencies/cities in Southeast Sulawesi have a very high dependency on external parties, especially the central government, unable to fund their activities independently without relying on external assistance, are able to finance 8.85% to 33.45% of their expenditures and other basic obligations, and have continuously growing revenues from 2019 to 2023, indicating positive economic prospects for the future.

Keywords: *Regional Expansion, Regional Dependence, Fiscal Independence, Income Share, Income Growth*

ABSTRAK

Pemekaran daerah terjadi cukup masif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk tahun 1964 dengan empat kabupaten, kemudian sampai tahun 2014 telah terdapat pemekaran 13 kabupaten/kota. Penelitian ini mengukur kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 dengan indikator pengukuran meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, serta *income share* dan *income growth* yang disajikan dalam kuadran sebaran kemampuan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran di Sulawesi Tenggara memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pihak luar khususnya pemerintah pusat, belum mampu mendanai kegiatan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal, memiliki kemampuan membiayai 8,85% s.d. 33,45% belanja dan kewajiban pokok lainnya, serta memiliki pendapatan yang terus-menerus bertumbuh dari tahun 2019-2023 dan menunjukkan prospek ekonomi di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pemekaran Daerah, Ketergantungan Daerah, Kemandirian Fiskal, Income Share, Income Growth*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga karya akhir yang berjudul “Fenomena Pemekaran Daerah di Sulawesi Tenggara: Mengukur Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya” dapat diselesaikan. Karya akhir ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan program profesi akuntan di Universitas Tarumanegara.

Proses pengerjaan karya akhir ini melibatkan banyak pihak yang sangat membantu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Istri, Anak, Ayah, dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh untuk setiap langkah yang dijalani oleh penulis.
2. Bapak Dr. Jamaluddin Iskak, MSI., Ak., CPI., CA., CPA., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Tarumanegara.
3. Bapak Prof. Dr. Ignatius Roni Setyawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Karya Akhir yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam pengerjaan karya akhir ini.
4. Semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian karya akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam karya tulis ini, penulis mohon maaf. Penulis berharap karya akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Desember 2024

Singih Setya Zenanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.5.1 Manfaat bagi Akademisi	4
1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	4
1.5.3 Manfaat bagi Akademisi	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pemekaran Daerah	7
2.2 Keuangan Daerah.....	8
2.2.1 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	9
2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
2.2.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	12
2.2.4 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.....	12
2.3 Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Objek Penelitian.....	15
3.2 Metode Penelitian	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20

4.1	Fenomena Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	20
4.2	Ketertanggung Daerah dan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara	22
4.2.1	Ketertanggung Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Sulawesi Tenggara	22
4.2.2	Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Sulawesi Tenggara	25
4.3	<i>Income Share</i> dan <i>Income Growth</i> Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Sulawesi Tenggara.....	27
4.3.1	<i>Income Share</i> Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Sulawesi Tenggara	27
4.3.2	<i>Income Growth</i> Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Sulawesi Tenggara	29
4.4	Sebaran Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Pemekarannya di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	31
BAB V SIMPULAN		34
5.1	Simpulan.....	34
5.2	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA		36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Daerah	16
Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Fiskal.....	17
Tabel 3 Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2019-2023.....	23
Tabel 4 Tingkat Kemandirian Fiskal Tahun 2019-2023	25
Tabel 5 Tingkat Income Share Tahun 2019-2023	28
Tabel 6 Tingkat Income Growth Tahun 2019-2023	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kuadran Sebaran Kemampuan Daerah Berdasarkan Rata-rata Income Share dan Income Growth Tahun 2019-2023	31
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah mulai banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 215 daerah otonom kabupaten/kota hasil pemekaran selama tahun 1999-2014 yang terdiri dari 181 kabupaten dan 34 kota. Jadi Indonesia telah memiliki 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di 38 provinsi. Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, pemekaran wilayah cukup masif, pada periode 1964-1998 terdapat satu pemekaran kota, sedangkan periode 1999-2014 terdapat sebelas pemekaran kabupaten dan satu pemekaran kota. Beberapa tujuan dari pemekaran ini adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, meningkatkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan percepatan atas kualitas pelayanan publik, mendorong peningkatan atas kualitas tata kelola pemerintahan daerah, membantu dalam peningkatan kemampuan bersaing secara nasional dan daerah, serta melestarikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah yang memiliki keunikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu persyaratan dalam pemekaran daerah adalah persyaratan dasar kapasitas daerah, dimana terdapat parameter potensi ekonomi dan keuangan daerah untuk pembentukan daerah persiapan yang akan dimekarkan. Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan dituntut untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Potensi unggulan daerah dapat meliputi potensi pertanian, perdagangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pariwisata, serta perindustrian. Selain itu, Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan harus siap mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta siap mengelola keuangan dan aset daerahnya masing-masing. Selanjutnya, apabila telah ditingkatkan statusnya sebagai daerah

otonomi baru maka kabupaten/kota tersebut harus mampu mengelola ekonomi dan keuangan daerahnya.

Disisi lain, dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam metode penganggaran, sebelumnya anggaran merupakan daftar belanja yang harus dihabiskan, namun saat ini terdapat perubahan sudut pandang dimana anggaran harus dihemat atau efisien, sehingga muncul teori anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah unsur perubahan keuangan di Indonesia, dimana terdapat perubahan mendasar dalam reformasi keuangan (Hoesada, 2021). Tahapan dalam anggaran berbasis kinerja diawali dengan menetapkan visi entitas serta sasaran entitas yang terdiri dari sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Kemudian entitas merencanakan kinerja tahunan serta menetapkan target hasil yang akan dicapai. Target tersebut diuraikan menjadi target kinerja tahunan untuk kegiatan utama entitas yang diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi, program utama, serta proyek entitas. Namun saat ini banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mampu menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat kemungkinan dampak pada kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, teori keagenan menerangkan bahwa prinsipal dan agen memiliki suatu hubungan kontraktual (Andriawan & Setyawan, 2020). Di dalam pemerintahan, masyarakat dimana dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan principal, sedangkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah merupakan agen (Indra et al., 2022). Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa setiap individu akan didorong oleh kepentingan pribadi, dimana memungkinkan timbulnya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Widoatmodjo & Setyawan, 2023). Berdasarkan teori keagenan, ekspektasi prinsipal belum tentu dapat dipenuhi oleh agen, termasuk dalam pemerintahan daerah. Agen akan mempertimbangkan beberapa aspek keuangan dalam menetapkan dan memilih kebijakan keuangan yang tepat untuk memenuhi ekspektasi prinsipal (Setijaningsih et al., 2021). Ekpektasi masyarakat yang diwakili oleh DPRD terhadap kondisi keuangan daerah belum tentu dapat dipenuhi dan sejalan dengan prioritas yang ditetapkan oleh kepala daerah, khususnya di

Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh daerah pemekaran. Terdapat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja yang bersifat saling berkesinambungan, struktur suatu industri berkorelasi dengan perilaku industri tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja dalam industri bersangkutan (Setyawan et al., 2022). Hal tersebut juga dapat terjadi dalam pemerintahan daerah, dimana struktur dari pemerintahan daerah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dengan masifnya pemekaran daerah di Sulawesi Tenggara, dan untuk melihat kemampuan daerah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja serta hubungan keagenan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola ekonomi dan keuangannya, maka dilakukan penelitian atas kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat identifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana fenomena pemekaran daerah kabupaten/kota yang terjadi di Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?
3. Bagaimana tingkat *share* dan tingkat *growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?
4. Bagaimana sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *share* dan *growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota induk dan daerah pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Analisis kondisi keuangan daerah meliputi tingkat ketergantungan daerah, tingkat kemandirian fiskal, *share*, *growth*, dan sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *share* dan *growth*.
3. Tahun anggaran 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena pemekaran daerah kabupaten/kota yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui tingkat *share* dan tingkat *growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *share* dan *growth* pada kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi akademisi untuk melakukan kajian atau penelitian sejenis serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam studi terkait pemekaran wilayah di Indonesia.

1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kondisi keuangan daerah khususnya dalam perbaikan kondisi

keuangan terkait ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, *share*, dan *growth* serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah.

1.5.3 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan mencapai gelar Akuntan (Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara serta dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dalam hal mengukur dan menilai kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada karya akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, masalah/isu pokok atau fenomena dari topik yang diteliti, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi uraian teori dan konsep terkait dengan penelitian ini yaitu pemekaran wilayah, keuangan daerah, serta kondisi keuangan daerah yang meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, *share*, *growth*, dan sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *share* dan *growth*.

Bab III Metode Penelitian berisi uraian objek penelitian dan metode penelitian yang meliputi metode perolehan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Bahasan berisi hasil analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan daerah pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 yang meliputi ketergantungan daerah, kemandirian fiskal, *share*, *growth*, dan sebaran kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisis *share* dan *growth*.

Bab V Simpulan dan Saran membahas tentang simpulan untuk menjawab permasalahan berupa kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota induk dan

daerah pemekarannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2023 serta saran yang berisi usulan untuk pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, & Setyawan, I. R. (2020). Earning Management Actions and Conditional Revenue as Managerial Efforts to Maintain Bond Rating. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(03), 349–372. <https://doi.org/10.33312/ijar.484>
- Azwar. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education (JIGE)*, 4(1), 219–228.
- Hoesada, Dr. J. (2021). *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis (I)*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Indra, Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Kusuma, R. (2011). Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 26(3), 1–31.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–309.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020> (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> (2019).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53754/perpu-no-2-tahun-1964> (1964).

- Putra, Z. (2023). *Manajemen Keuangan Daerah Kontemporer* (1st ed.). Kencana, Jakarta.
- Setijaningsih, H. T., Handoyo, S. E., & Sundari, N. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods for Investment Property. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(1), 111–121. <https://doi.org/10.33830/jom.v17i1.1052.2021>
- Setyawan, I. R., Ekadjaja, M., & Ekadjaja, A. (2022). Industry Market Structure and Banking Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(2), 346–354. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0056>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022> (2022).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50314/uu-no-13-tahun-1964> (1964).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999> (1999).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (2014).
- Widoatmodjo, S., & Setyawan, I. R. (2023). Special Treatment to Bank CEOs in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 137–147. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0037>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.